Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Volume 9 Nomor 1 Edisi Juni 2025
https://journal.upgripnk.ac.id/index.php/kewarganegaraan/issue/view/232
DOI: https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i1

Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Pada Kader Partai Di DPD Partai Gerindra Sumut Kecamatan Medan Polonia Kota Medan

Dandy Geofani Silaban *
Universitas Negeri Medan, Indonesia
Email: dandysilaban88@gmail.com

Windawati Pinem
Universitas Negeri Medan, Indonesia
Email: windawatipinem@unimed.ac.id

**Corresponding Author*

Article History

Submitted : 2024-10-25
Revised : 2025-06-09
Accepted : 2025-06-09
Published : 2025-06-10
DOI: https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i1.8134

Abstrak
Penelitian ini mengkaji peran Partai Gerindra Sumatera Utara (DPD Gerindra Sumut) Kecamatan Medan Polonia dalam meningkatkan wawasan kebangsaan kadernya. Permasalahan utama adalah rendahnya pemahaman kader terkait wawasan kebangsaan, yang disebabkan oleh belum efektifnya edukasi Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) dalam kaderisasi dan sosialisasi politik. Akibatnya, muncul pelanggaran seperti kekerasan dan korupsi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tujuh kader aktif, penelitian ini menemukan bahwa Partai Gerindra belum optimal. Sosialisasi dan kaderisasi politik tidak rutin, hanya diadakan saat ada kader baru atau menjelang pemilu. Oleh karena itu, partai politik, khususnya Gerindra, perlu rutin melaksanakan sosialisasi dan kaderisasi politik untuk meningkatkan pemahaman kader mengenai nilai-nilai wawasan kebangsaan.

Kata kunci: Relasi suku, orientasi politik, identitas suku, isu politik

Abstract
This study investigates the role of the Gerindra Party in North Sumatra (DPD Gerindra Sumut), specifically in the Medan Polonia District, in enhancing its cadres' national consciousness. The primary issue identified is the low level of understanding among cadres regarding national consciousness, largely due to the ineffective education of the Four National Pillars (Pancasila, 1945 Constitution, Unitary State of the Republic of Indonesia, and Bhinneka Tunggal Ika) within political cadre development and socialization programs. This deficiency has unfortunately led to various violations, including violence and corruption. Employing a descriptive qualitative method, utilizing interviews, observation, and documentation with seven active cadres, the research reveals that the Gerindra Party's efforts have not been optimal. Political socialization and cadre development activities are not conducted routinely; instead, they are only held when new cadres join or in the run-up to elections. Therefore, political parties, particularly Gerindra, must consistently implement political socialization and cadre development programs to significantly improve their cadres' understanding of national consciousness values.

Keywords: Ethnic relations, political orientation, ethnic identity, political issues,

PENDAHULUAN

Partai politik adalah pilar penting dalam sistem demokrasi, berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara elite dan masyarakat. Melalui perannya, partai politik mampu memahami dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi rakyat. Kemampuan partai dalam merespons langsung aspirasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap elite

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial-sharealike 4.0 international license.

dan kader partai. Oleh karena itu, penting bagi elite dan kader partai untuk terus aktif berinteraksi dengan rakyat, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, demi menjaga relevansi dan legitimasi mereka.

Di Indonesia, pemerintahan dijalankan berdasarkan sistem demokrasi perwakilan, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat yang diwakilkan oleh institusi politik, termasuk partai politik. Demokrasi pada dasarnya adalah sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat memiliki otoritas utama dalam pelaksanaan demokrasi. Menurut Agus (Suparman A.G, 2017), partai politik hadir dalam masyarakat demokratis untuk membentuk institusi yang menampung hak dasar politik masyarakat, dengan fungsi utama menyelaraskan kepentingan, nilai-nilai, dan pandangan yang mendukung aspirasi atau ideologi bersama.

Partai politik memiliki peran krusial dalam meningkatkan wawasan kebangsaan kadernya. Dalam negara demokrasi, partai politik menjadi wadah vital bagi masyarakat sebagai representasi yang mendengarkan aspirasi dan merumuskan kebijakan publik. Banyak masalah dan tantangan yang muncul dalam negara seringkali disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap wawasan kebangsaan. Akibatnya, masalah yang seharusnya diselesaikan secara kolektif sering kali ditangani secara parsial, yang tentu saja tidak efisien.

Secara umum, wawasan kebangsaan merujuk pada keutuhan nasional atau nusantara. Dalam konteks ini, wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang utuh dan meresapi seluruh aspek wilayah nusantara, demi mendukung kepentingan nasional. Konsep ini menuntut setiap warga negara dan aparatur negara untuk berpikir, bersikap, dan bertindak secara komprehensif dalam konteks yang lebih luas demi kepentingan bersama bangsa. (Hasanah & Dzikrika, 2020). Asas wawasan kebangsaan meliputi: keselarasan kepentingan dan tujuan, solidaritas, keadilan, kerja sama, kejujuran, dan kesetiaan terhadap kesepakatan sebagai landasan pandangan tersebut.

Indonesia, sebagai negara besar, memiliki Empat Pilar Kebangsaan yang menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pilar-pilar tersebut adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar ini merupakan landasan fundamental yang memberikan nilai-nilai kebangsaan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Namun, temuan penelitian ini mengindikasikan adanya tantangan signifikan dalam tingkat pemahaman wawasan kebangsaan di kalangan kader Partai Gerindra di DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, yang dinilai masih rendah. Akar permasalahan ini terletak pada inefektivitas edukasi Empat Pilar Kebangsaan dalam program kaderisasi dan sosialisasi politik partai. Konsekuensinya, para kader belum sepenuhnya menginternalisasi dan menghayati nilai-nilai fundamental ini. Situasi demikian berpotensi merugikan kredibilitas partai politik dan citra publiknya, mengingat seringnya muncul kasus pelanggaran etika dan hukum yang melibatkan kader partai, seperti tindakan korupsi, kekerasan, dan perilaku asusila. Sebagai ilustrasi, sebuah laporan dari Nuansapost.id (https://nuansapost.id/2024/05/30/diduga-melakukan-perbuatan-asusila-jk-anggota-dprd-terpilih-pada-pemilu-2024-di-rohul-resmi-dilaporkan-ke-dpp-partai-gerindra/) menyebutkan kasus seorang kader Gerindra di Kabupaten Rokan Hulu, Riau,

Copyright © Jpkn 2025

berinisial JK—anggota DPRD terpilih pada Pemilu 2024—yang terbukti melakukan perselingkuhan. Atas dasar bukti tersebut, JK telah menerima sanksi tegas dan diproses sesuai mekanisme internal Partai Gerindra Kabupaten Rokan Hulu.

Kredibilitas partai politik kerap tergerus oleh pelanggaran etika dan hukum yang dilakukan oleh kadernya, suatu fenomena yang membutuhkan analisis mendalam. Sebagai contoh, pada tahun 2021, Kompas.com melaporkan kasus dugaan pemerkosaan dan kekerasan di Papua yang melibatkan seorang calon legislatif (caleg) dari Partai Gerindra. Kasus ini mengindikasikan adanya pemaksaan terhadap empat siswi berusia 16 tahun di Jayapura untuk mengonsumsi alkohol, yang kemudian berujung pada dugaan rudapaksa. Insiden ini, yang dikategorikan sebagai tindakan asusila terhadap anak di bawah umur, telah dikonfirmasi oleh Kepolisian Daerah Papua (Kompas.tv, "Pemerkosa Remaja di Jayapura Ternyata Caleg Gerindra, Habiburokhman: Sudah Tak Diakui").

Selain itu, peristiwa serupa juga terjadi di Kota Medan. Detik.com memberitakan pada September 2022 mengenai kasus asusila yang melibatkan kader Partai Gerindra Kota Medan, Siti Suciati. Politisi tersebut terbukti melakukan video call sex yang memperlihatkan organ tubuhnya dengan seorang narapidana yang menyamar sebagai anggota Polri. Rekaman tindakan ini kemudian tersebar luas di media sosial. Konsekuensi dari perilaku tersebut, Siti Suciati dipecat dari Partai Gerindra (Detik.com, "Profil Siti Suciati, Anggota DPRD Medan yang Dipecat Gerindra"). Kasus-kasus ini menyoroti urgensi penguatan integritas dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan di dalam struktur partai politik untuk mencegah terulangnya insiden yang merugikan citra dan kepercayaan publik.

Berkesinambungan tentang penjelasan masalah tersebut, maka adanya hubungan antara kaderisasi dan sosialisasi dengan masalah yang menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kader partai yang sudah dijelaskan di atas. Kaderisasi politik dan sosialisasi politik sangat perlu dilaksanakan dengan efisien dan bermanfaat oleh partai politik, dalam mengedukasi tentang empat pilar kebangsaan sebagai dasar pemahaman nilai wawasan kebangsaan sehingga menghasilkan integritas, kualitas, dan pemahaman nilai wawasan kebangsaan yang baik.

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Adapun Alasan penelitian ini dilaksanakan adalah untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana peran yang dilakukan partai politik DPD Gerindra dalam meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan yang tergolong rendah sehingga menyebabkan timbulnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kader partai yang menyimpang dan melanggar nilai-nilai kebangsaan dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka partai politik harus lebih berfokus meningkatkan pemahaman nilai wawasan kebangsaan yang baik dan mewujudkan kualitas kader partai yang unggul dan bermutu, serta mampu memaknai pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka penelitian ini akan mengkaji bagaimana empat pilar kebangsaan salah satunya adalah Nilai Pancasila dan UUD 1945 dapat diberikan dalam kegiatan kaderisasi politik dan sosialisasi politik sehingga diharapkan dapat meningkatkan wawasan kader partai di DPD Partai Gerindra Sumut Kecamatan Medan Polonia Kota Medan.

Copyright © Jpkn 2025

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Pada Kader Partai Di Dpd Partai Gerindra Sumut Kecamatan Medan Polonia Kota Medan".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan dan pembahasan terkait pemahaman kader Partai Gerindra DPD Sumatera Utara, Kecamatan Medan Polonia, mengenai wawasan kebangsaan, khususnya Empat Pilar Kebangsaan.

Konsensus Wawasan Kebangsaan

Wawasan Kebangsaan dalam konsensus kebangsaan merujuk dalam pemahaman yang dimiliki oleh seseorang bagaimana dalam memahami dan memaknai nilai-nilai dasar Pancasila. Wawasan kebangsaan adalah sudut pandang atau sikap seseorang yang mencerminkan rasa cinta tanah air dan penghormatan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagaimana sebagai pedoman masyarakat Indonesia dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Dalam pembahasan ini akan dikaji yaitu Empat konsesus kebangsaan sebagai dasar pemahaman dalam mengetahui wawasan kebangsaan antara lain: Nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

1. Pemahaman Tentang Nilai Pancasila

Berdasarkan wawancara, pemahaman kader mengenai Pancasila sangat kuat. Bapak Aripay Tambunan memaknai Pancasila sebagai pedoman penting dalam kehidupan bermasyarakat, mengajarkan tentang ketuhanan, kepribadian yang baik, serta sikap menghormati, menghargai, dan menolong sesama tanpa memandang agama, suku, atau ras. Hal senada disampaikan Bapak Frans Sihombing, yang menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tak terpisahkan dan vital bagi individu serta negara. Ia mengutip Bung Karno tentang keterikatan sila-sila Pancasila, terutama sila ketiga (persatuan), yang mendorong toleransi antarumat beragama, suku, dan ras.

Bapak Ikrimah Hamidy menambahkan bahwa Pancasila mampu meningkatkan kepedulian terhadap bangsa. Ia menekankan pentingnya pembinaan bagi pelanggar nilai-nilai Pancasila untuk menguatkan pemahaman dan nasionalisme. Baginya, kelima sila Pancasila bermakna dalam keseharian, memupuk perilaku peduli, menghargai, toleran, dan menghormati ibadah serta adat istiadat.

Bang Adek Ardiansyah menyatakan bahwa Partai Gerindra dikenal dengan pengajaran kebangsaan yang tinggi, menjadikan nilai-nilai Pancasila bukan hal baru bagi kadernya. Ia menggambarkan Gerindra sebagai partai nasionalis dan agamis yang berada di tengah antara PDIP dan PKS. Bapak Bahtera juga menegaskan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara yang harus ditaati dan diamalkan sebagai wujud kepribadian bangsa yang baik.

Namun, Bang Muhammad Affan menyoroti bahwa banyak kader yang hanya "mengetahui" nilai Pancasila tetapi jarang mengamalkannya. Sementara itu, Bang Muhammad Hariman Siregar berpendapat bahwa sila-sila Pancasila saling terikat; tanpa pemaknaan sila-sila tersebut, seseorang tidak bisa dikatakan nasionalis. Memaknai Pancasila berarti berprinsip menjadi warga negara yang taat pada dasar negara.

Copyright © Jpkn 2025

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemaknaan sila-sila Pancasila sangat memikat dan tak terpisahkan dari masyarakat, khususnya kader partai. Pancasila adalah dasar negara yang harus ditaati dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memahami dan memaknai nilai-nilai Pancasila berarti mampu memiliki pribadi yang taat beragama, menghargai suku, ras, dan antargolongan, serta mengamalkannya dalam lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Pemahaman Tentang Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai peraturan tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara dan sistem ketatanegaraan. UUD 1945 berfungsi sebagai landasan pembentukan undang-undang dan peraturan di bawahnya. Bagian ini mengkaji pemahaman kader mengenai UUD 1945.

Bapak Aripay Tambunan menekankan pentingnya UUD 1945. Menurutnya, tidak sejalan dengan prinsip UUD dapat berdampak buruk. Konstitusi harus dihormati dan dijunjung tinggi sebagai sumber hukum yang melekat pada masyarakat dan kader partai. Seluruh pasal dan ayat UUD menjadi dasar dalam menjalani hidup, bersikap, dan bertindak. Bapak Frans Sihombing menambahkan bahwa keputusan-keputusan dalam UUD adalah dasar berkehidupan, dan peraturan-peraturan tersebut berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa UUD sangat penting dalam pemerintahan dan berlaku bagi seluruh aspek kehidupan, serta sangat dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap kegiatan partai.

Bapak Ikrimah Hamidy juga menyatakan bahwa UUD 1945 sangat berpengaruh dalam sistem pemerintahan. Sebagai kader, ia memahami bahwa kegiatan politik partai harus berjalan sesuai ketentuan UUD. Bang Adek Ardiansyah melihat UUD sebagai ketentuan hukum yang berfungsi dalam kehidupan, dan peraturan yang ditetapkan UUD selalu dijunjung tinggi selama bermanfaat. Bapak Bahtera dan Bang Muhammad Affan serta Bang Muhammad Hariman Siregar senada dalam menyatakan bahwa UUD 1945 harus dihormati dan dijunjung tinggi, terutama dalam hal-hal politik yang berdampak baik bagi bangsa.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peran sentral sebagai pedoman bagi seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 sangat melekat dalam kehidupan masyarakat dan setiap pelaksanaan kegiatan, termasuk kegiatan politik, tentunya berlandaskan pada ketentuan hukum yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3. Pemahaman Tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Ir. Soekarno sebagai Bapak Proklamator, mengumandangkan Indonesia sebagai negara kesatuan berbentuk Republik. Para tokoh bangsa berpendapat bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan karena keberagaman masyarakatnya yang majemuk. Dengan nasib sepenanggungan yang sama, Indonesia ditetapkan sebagai Negara Kesatuan yang dilandaskan Ideologi Pancasila. Pembahasan ini mengkaji pemahaman kader mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bapak Aripay Tambunan memahami NKRI sebagai negara dengan kedaulatan di tangan rakyat, berlandaskan Pancasila. Bapak Frans Sihombing menjelaskan bahwa NKRI adalah negara kesatuan yang tercipta karena adanya masyarakat yang beragam, dipedomani oleh

Copyright © Jpkn 2025

Ideologi Pancasila. Bapak Ikrimah Hamidy juga menyatakan bahwa NKRI tidak lepas dari ideologi Pancasila, lahir dari keberagaman agama, suku, adat, dan ibadah, serta sebagai pengingat jasa pahlawan yang gugur memperjuangkan kemerdekaan.

Bang Adek Ardiansyah melihat NKRI sebagai negara yang dikenal dengan persatuan dan kesatuannya, di mana cinta tanah air berarti cinta persatuan dan kesatuan. Bapak Bahtera memahami NKRI sebagai negara demokratis yang kaya alam dan harus terus diperkuat dalam persatuannya. Bang Muhammad Affan berpendapat bahwa Indonesia adalah negara yang memperjuangkan nilai-nilai bangsa, dengan sejarah perjuangan hak-hak kebangsaan yang demokratis. Bang Muhammad Hariman Siregar menambahkan bahwa NKRI adalah negara yang bersatu, merangkul seluruh ragam agama yang dimiliki, dan tak terpisahkan dari kehidupan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dipahami sebagai negara yang bersatu dan memiliki sejarah perjuangan panjang oleh tokoh bangsa seperti Ir. Soekarno dan Bung Hatta. Indonesia adalah negara majemuk dengan beragam agama, suku, ras, budaya, adat, dan kekayaan alam. NKRI terbentuk sebagai negara Republik dengan ideologi Pancasila sebagai pedoman utama masyarakat dan UUD 1945 sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

4. Pemahaman Tentang Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia, "berbeda-beda namun tetap satu jua". Semboyan ini mengandung makna keanekaragaman bangsa Indonesia yang, meskipun berbeda, tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Pembahasan ini berfokus pada pemahaman Bhinneka Tunggal Ika di kalangan kader partai.

Bapak Aripay Tambunan mengartikan semboyan ini sebagai kajian tentang perbedaan yang tetap menjadi keutuhan dalam persatuan. Ia menekankan pentingnya menghormati dan menghargai setiap ibadah dan perbedaan agama, suku, serta ras. Bapak Frans Sihombing mengaitkan Bhinneka Tunggal Ika dengan sila ketiga Pancasila, menegaskan bahwa perbedaan bukanlah halangan karena bangsa ini diperjuangkan oleh masyarakat yang beragam, sehingga nilai kesatuan harus selalu dijunjung tinggi. Bapak Ikrimah Hamidy juga berpendapat bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang menyoroti keanekaragaman, di mana perbedaan agama, suku, ras, golongan, budaya, dan adat ditempatkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bang Adek Ardiansyah menyatakan bahwa Bapak Prabowo (Ketua Umum Partai Gerindra) selalu menekankan kader untuk menjunjung tinggi nilai kesatuan, yang juga ia pribadi junjung dalam aktivitasnya. Bapak Bahtera mengaitkan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika dengan toleransi dan pentingnya menghayati semboyan tersebut. Bang Muhammad Affan memahami Bhinneka Tunggal Ika sebagai istilah persatuan, dan sebagai kader, ia ingin persatuan itu melekat di hati. Bang Muhammad Hariman Siregar melihat Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip kebangsaan dalam menjalani kehidupan, yang mengikat meskipun banyak isu politik.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah pilar kebangsaan yang merujuk pada pemahaman masyarakat, khususnya kader partai, tentang makna perbedaan sebagai keunikan dan ciri khas bangsa Indonesia. Perbedaan ini bukan

Copyright © Jpkn 2025

penghalang, melainkan justru yang menciptakan persatuan dengan satu tujuan, serta merupakan anugerah istimewa bagi bangsa Indonesia.

5. Peran Partai Dalam Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Pada Kader Partai

Partai politik memiliki peran fundamental dalam meningkatkan pemahaman nilai-nilai wawasan kebangsaan di kalangan kadernya. Partai politik bertanggung jawab dalam memenuhi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Empat Konsensus Kebangsaan agar kader partai mampu melaksanakan aktivitas politiknya dengan baik. Pembahasan ini mengulas peran dan pelaksanaan sosialisasi serta kaderisasi politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra.

Bapak Aripay Tambunan menyampaikan bahwa Partai Gerindra sangat melekat dengan nilai-nilai kebangsaan. Ia menilai pelaksanaan pengkaderan, sosialisasi, dan bimbingan teknis cukup efektif. Namun, ia berharap ada evaluasi agar kegiatan partai rutin dilakukan, tidak hanya saat pemilihan umum (Pileg, Pilkada, Pilpres). Ia berharap kader mampu memaknai wawasan kebangsaan dengan lebih baik. Bapak Frans Sihombing mengakui bahwa kegiatan yang dilakukan memang memenuhi nilai-nilai wawasan kebangsaan, namun pelaksanaannya seringkali dikondisikan oleh situasi dan kondisi. Kegiatan pengkaderan untuk kader baru adalah yang paling sering dilakukan.

Bapak Ikrimah Hamidy merasa perlu ditingkatkan, terutama kegiatan sosialisasi politik, karena sangat penting bagi kader. Ia mengamati bahwa rapat kader kebanyakan dilaksanakan menjelang Pilkada, Pileg, atau Pilpres. Pendapat ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi politik Partai Gerindra belum optimal dan perlu peningkatan. Keterkaitan dengan ajang pemilu ini menyebabkan kegiatan rutin sosialisasi jarang terlaksana. Bang Adek Ardiansyah juga menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan bermula dari bimbingan teknis untuk kader baru, dan rapat atau sosialisasi jarang dilaksanakan belakangan ini karena adanya pemilu Pilkada.

Bapak Bahtera menjelaskan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan kebangsaan dan Pancasila di Partai Gerindra dilaksanakan pada awal masuknya kader baru dan saat ada calon kader yang akan maju Pilkada. Kader baru diberikan bimbingan teknis dan sosialisasi politik. Senada dengan itu, Bang Muhammad Affan pernah mengikuti bimbingan teknis di Hambalang, dan kegiatan kaderisasi serta sosialisasi politik ia ketahui hanya saat awal masuk sebagai kader. Bang Muhammad Hariman Siregar juga berpendapat bahwa pelaksanaan kegiatan politik Partai Gerindra disesuaikan dengan kebutuhan, seperti saat ada kader baru atau menjelang pemilu.

Berdasarkan pendapat para informan melalui wawancara, dapat disimpulkan bahwa kaderisasi politik dan sosialisasi politik di Partai Gerindra umumnya dilaksanakan saat awal masuknya kader baru. Selain itu, terdapat bimbingan teknis untuk kader muda dan madya. Meskipun kegiatan-kegiatan ini memuat nilai-nilai pemahaman wawasan kebangsaan dan sangat baik bagi kader partai, frekuensi pelaksanaannya masih belum optimal dan cenderung bergantung pada momentum tertentu seperti adanya kader baru atau menjelang pemilihan umum.

SIMPULAN

Penelitian ini menyelidiki peran partai politik dalam meningkatkan wawasan kebangsaan kader di DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Kota Medan. **Wawasan kebangsaan**

Copyright © Jpkn 2025

didefinisikan sebagai pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan yang merefleksikan karakteristik bangsa Indonesia, termasuk cinta tanah air serta ketaatan terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Wawasan kebangsaan ini berlandaskan pada **Empat Pilar Kebangsaan**: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai ini krusial bagi kader partai dalam setiap aktivitas politik mereka.

Partai politik memegang **peran sentral** dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan kader. Ini mencakup tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi dan kaderisasi politik secara rutin dan efektif. Dari hasil penelitian, secara **kognitif**, tiga dari tujuh kader Partai Gerindra menunjukkan pemahaman yang baik terhadap kedudukan dan pentingnya Empat Pilar Kebangsaan, namun empat kader lainnya masih memerlukan peningkatan pemahaman. Secara **afektif**, terdapat sikap dukungan terhadap penghormatan UUD 1945, namun juga muncul kekecewaan atas pelanggaran nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang dilakukan oleh oknum kader. Hal ini mengindikasikan bahwa penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan perlu diperkuat. Dari aspek **psikomotorik**, kader menunjukkan partisipasi aktif dalam kegiatan partai, menandakan ketertarikan mereka terhadap sosialisasi dan kaderisasi politik.

Meskipun peran Partai Gerindra dalam meningkatkan wawasan kebangsaan kader sudah terlihat, efektivitasnya masih belum optimal, terutama karena empat kader belum memahami Empat Pilar Kebangsaan secara memadai. Oleh karena itu, **Partai Gerindra perlu secara konsisten dan rutin menyelenggarakan kegiatan yang mendukung peningkatan wawasan kebangsaan kader**. Upaya ini esensial untuk mencetak kader partai yang unggul, berkualitas, bertanggung jawab, serta memiliki rasa kepedulian dan kemanusiaan yang tinggi, demi kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aminullah, A. (2023). Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Serta Tantangan Dan Solusinya. *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala*, *8*(2), 408–423. https://doi.org/10.58258/jupe.v8i2.5366

Basri, S. (2011). *Pengantar Ilmu Politik*. Indie Book Corner.

Damri, F. E. P. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Prenadamedia Group.

Fajrina, A. H. (2017). Strategi Rekrutmen Partai Gerindra dalam Kaderisasi Pemuda di Kota Surabaya. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 6(1), 7.

Firmanzah. (2008). Mengelola Partai Politik - Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi. Yayasan Obor Indonesia.

Harahap, I. H. (2018). Kaderisasi Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., July, 1–9.

Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif (H. Sazali (ed.); Pertama). Wal Ashri.

Hardani. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In LP2M UST Jogja (Issue March).

Haryanto. (2018). Sosialisasi Politik Suatu Pemahaman Awal. In Gastronomía ecuatoriana turismo local. (Vol. 1, Issue 69). Penerbit PolGov.

Copyright © Jpkn 2025

Hasanah, I., & Dzikrika, N. (2020). Kajian Wawasan Kebangsaan Dan Partisipasi Politik Masyarakat Perbatasan Temajuk. Jurnal Cendekia SAMBAS, 1(1), 40–49. https://cendekia.manicsambas.sch.id/index.php/cendekia/article/view/6/4

Hololulloh, B. C. (2014). Persepsi masyarakat terhadap empat pilar kebangsaan di kampung agung jaya kecamatan banjar margo tulang bawang tahun 2013. Jurnal kultur demokrasi (jkd), 2(5).

Isharyanto. (2017). Partai Politik, Ideologi, dan Kekuasaan.

Kaelan. (2014). Pendidikan Pancasila (10th ed.). Penerbit Paradigma Yogyakarta.

Khaeruman, B., & Ghazali, A. M. (2020). 4 Pilar Wawasan Kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. In LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung. http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/41444

Lumeno, D. H., & Pati. (2022). Peran Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik bagi Masyarakat di Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Eksekutif, 2(2), 1–10.

Marsudi, H. S. Al. (2012). Pancasila dan UUD'45 Dalam Paradigma Reformasi. Rajawali Pers.

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial.

Nurfatimah, S. A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menumbuhkembangkan Wawasan Kebangsaan Di Kehidupan Bangsa Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan, 5(1), 176–183. https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1446

Ratnaningtyas, E. M. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif (N. Saputra (ed.)). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 2(1), 48–60. https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18

Saidurrahman, A. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan NKRI Harga Mati. Prenadamedia Group.

Siregar, N. (2022). Pendidikan Wawasan Kebangsaan Di Era Globalisasi. Educate: Journal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran, 1(2), 255–266. https://doi.org/10.56114/edu.v1i2.398

Soerjanto Poespowardojo, F. M. P. (1994). Pendidikan Wawasan Kebangsaan Tantangan dan Dinamika PerjuanganKaum Cendekiawan Indonesia. Penerbit PT Grasindo.

Solihah, R., Kartini, D. S., & Herdiansah, A. G. (2022). Sosialisasi Model Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Politik Di Indonesia Masa Reformasi. Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(2), 403. https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i2.36985

Suparman A.G, R. Y. . (2017). PARTAI POLITIK DAN KADERISASI (Membentuk Partai Politik yang Berkualitas Sesuai dengan Tuntutan Demokrasi) Agus. Moderat Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(4), 200–216.

Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik. Penerbit PT Grasindo.

Widodo, B. (2019). Membangun Wawasan Kebangsaan yang Religius Demi Mewujudkan Integrasi Nasional Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 4(3), 13–24.

Wiyono, S. (2019). Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Sebagai Panduan Dalam Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur Berdasarkan Pancasila. Journal of Chemical Information and Modeling, 15(1), 37–52.

Batlolone, V. (2021). Pemerkosa Remaja di Jayapura Ternyata Caleg Gerindra,

Habiburokhman: Sudah Tak Diakui. Kompas.Com. https://www.kompas.tv/nasional/211075/pemerkosa-remaja-di-jayapura-ternyata-caleg-gerindra-habiburokhman-sudah-tak-diakui#:~:text=JAKARTA%2C KOMPAS.TV - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra,dalam kasus tersebut sudah tidak aktif dari partai.

Nuansapost. (2024). Diduga Melakukan Perbuatan Asusila JK Anggota DPRD Terpilih Pada Pemilu 2024 Di Rohul Resmi Dilaporkan Ke – DPP Partai Gerindra. Nuansapost.Id. https://nuansapost.id/2024/05/30/diduga-melakukan-perbuatan-asusila-jk-anggota-dprd-terpilih-pada-pemilu-2024-di-rohul-resmi-dilaporkan-ke-dpp-partai-gerindra/

Timdetiksumut. (2022). Profil Siti Suciati Anggota DPRD Medan Yang Dipecat Gerindra.

Detik.Com. https://www.detik.com/sumut/berita/d-6319031/profil-siti-suciati-anggota- dprd-medan-yang-dipecat-gerindra

Copyright © Jpkn 2025